



## PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

### SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja, Telp. 21985

Website : [setda.bulelengkab.go.id](http://setda.bulelengkab.go.id), Email : [setda@bulelengkab.go.id](mailto:setda@bulelengkab.go.id)

## SINGARAJA

Singaraja, 29 Desember 2022

Nomor : 100 /3129/ Pem/XII/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Data LPPD**

Kepada ;  
Yth. ( Sesuai terlampir )  
di-  
**T e m p a t**

Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka dengan ini diminta untuk memfasilitasi pemenuhan data Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan format terlampir. Data dimaksud agar disampaikan melalui Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng paling lambat tanggal **16 Januari 2023 dilengkapi dengan data dukung** dari data yang dilaporkan tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Pj. Bupati Buleleng ; sebagai laporan.
2. Arsip.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara

1. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.
6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Buleleng.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng.
9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.
10. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.
12. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng.
13. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.
14. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.
15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
16. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.
17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
18. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng.
20. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.
21. Kepala Dinas Arsip Kabupaten Buleleng.
22. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
24. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng.
25. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.
26. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
27. Kepala Bagian Pengandaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng.
28. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng.



**INDIKATOR KINERJA KUNCI  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

A. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1	Pendidikan	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)		Disdikpora	
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Disdikpora	Sampai saat ini masih bersumber dari Pemerintah pusat
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Disdikpora	Sampai saat ini masih bersumber dari Pemerintah pusat
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)		Disdikpora	
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)		Disdikpora	



		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini		Disdikpora	
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non- formal dari lembaga pemerintah		Disdikpora	
		8	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		Disdikpora	
		9	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Disdikpora	
		10	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Disdikpora	Keterbatasan Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah
		11	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Disdikpora	Keterbatasan Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah

		12	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Disdikpora	Keterbatasan Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah
		13	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Disdikpora	
		14	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Disdikpora	
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		Disdikpora	
		16	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Disdikpora	
		17	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Disdikpora	
		18	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Disdikpora	
		19	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Disdikpora	
		20	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Disdikpora	

		21	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Disdikpora	
		22	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Disdikpora	
		23	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Disdikpora	
		24	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Disdikpora	
		25	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA / sederajat		Disdikpora	

		26	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Disdikpora	
		27	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)		Disdikpora	
		28	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Disdikpora	
		29	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Disdikpora	
		30	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Disdikpora	
		31	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Disdikpora	
		32	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki		Disdikpora	
			ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		Disdikpora	
		33	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1		Disdikpora	

2.	Kesehatan	1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dinas Kesehatan	Laporan SPM Dinas Kesehatan
		3	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		Dinas Kesehatan	
		4	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dinas Kesehatan	Laporan SPM Dinas Kesehatan
		5	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar		Dinas Kesehatan	
		6	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dinas Kesehatan	Laporan SPM Dinas Kesehatan
		7	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		Dinas Kesehatan	
		8	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dinas Kesehatan	Laporan SPM Dinas Kesehatan
		9	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Dinas Kesehatan	
		10	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dinas Kesehatan	Laporan SPM Dinas Kesehatan
		11	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar		Dinas Kesehatan	

			sesuai standar			
		12	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dinas Kesehatan	Laporan SPM Dinas Kesehatan
		13	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Dinas Kesehatan	
		14	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dinas Kesehatan	Laporan SPM Dinas Kesehatan
		15	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Dinas Kesehatan	
		16	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dinas Kesehatan	Laporan SPM Dinas Kesehatan
		17	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Dinas Kesehatan	
		18	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dinas Kesehatan	Laporan SPM Dinas Kesehatan
		19	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Dinas Kesehatan	
		20	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dinas Kesehatan	Laporan SPM Dinas Kesehatan
		21	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Dinas Kesehatan	

		22	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dinas Kesehatan	Laporan SPM Dinas Kesehatan
		23	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Dinas Kesehatan	
		24	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dinas Kesehatan	Laporan SPM Dinas Kesehatan
		25	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Dinas PUTR	Tidak menangani
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten /kota (m)		Dinas PUTR	
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Dinas PUTR	
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		Dinas PUTR	
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten / kota		Dinas PUTR	

		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota		Dinas PUTR	
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten /kota		Dinas PUTR	
		8	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Dinas PUTR	
		9	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten /kota (m)		Dinas PUTR	
		10	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten /kota (ha)		Dinas PUTR	
		11	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		Dinas PUTR	
		12	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten /kota		Dinas PUTR	
		13	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten /kota		Dinas PUTR	

		14	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten /kota		Dinas PUTR	
		15	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik		Dinas PUTR	Data Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2020 Form 7: Rekap Kondisi (132 Daerah Irigasi sesuai Permen Nomor 14/PRT/M/2015
		16	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik		Dinas PUTR	
		17	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik		Dinas PUTR	
		18	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota		Dinas PUTR	(Perbup Nomor 33 tahun 2014)
		19	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota		Dinas PUTR	(Perbup Nomor 61 tahun 2016)
		20	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaran SPAM		Dinas PUTR	Perumda air minum Tirta Hita Buleleng
		21	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		Dinas PUTR	
		22	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.		Dinas PUTR	SPAM BURANA

		23	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		Dinas PUTR	
		24	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		Dinas PUTR	
		25	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		Dinas PUTR	
		26	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		Dinas PUTR	
		27	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		Dinas PUTR	
		28	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		Dinas PUTR	
		29	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar		Dinas PUTR	
		30	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman		Dinas PUTR	
		31	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman		Dinas PUTR	

		32	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat		Dinas PUTR	
		33	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja		Dinas PUTR	
		34	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja		Dinas PUTR	
		35	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD		Dinas PUTR	
		36	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		Dinas PUTR	
		37	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi		Dinas PUTR	
		38	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting		Dinas PUTR	
		39	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung		Dinas PUTR	
		40	Penetapan Keputusan Bupati /Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung		Dinas PUTR	
		41	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan ilestarikan		Dinas PUTR	
		42	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi		Dinas PUTR	

		43	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab /Kota		Dinas PUTR	
		44	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara /dirawat		Dinas PUTR	
		45	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota		Dinas PUTR	
		46	Panjang jalan yang dibangun		Dinas PUTR	
		47	Panjang jembatan yg dibangun		Dinas PUTR	
		48	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		Dinas PUTR	
		49	Panjang jembatan yang diganti /dilebarkan		Dinas PUTR	
		50	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		Dinas PUTR	
		51	Panjang jembatan yang direhabilitasi		Dinas PUTR	
		52	Panjang jalan yang dipelihara		Dinas PUTR	
		53	Panjang jembatan yang dipelihara		Dinas PUTR	
		54	Jumlah Pelatihan Tenaga operator /teknisi/analisis di wilayah kabupaten /kota		Dinas PUTR	
		55	Jumlah tenaga kerja operator /teknisi /analisis yang terlatih di wilayah		Dinas PUTR	

			kabupaten/kota			
		56	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi Operator /teknisi /analisis di wilayah kabupaten/kota		Dinas PUTR	
		57	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		Dinas PUTR	
		58	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota		Dinas PUTR	
		59	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN		Dinas PUTR	
		60	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota		Dinas PUTR	
			untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		Dinas PUTR	
		61	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		Dinas PUTR	

		62	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota		Dinas PUTR	
		63	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.		Dinas PUTR	
		64	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten /kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi /analisis		Dinas PUTR	
		65	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator /teknisi/analisis di wilayah kab/kota		Dinas PUTR	
		66	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten /kota		Dinas PUTR	
		67	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Dinas PUTR	

		68	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas PUTR	
		69	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas PUTR	
		70	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas PUTR	
		71	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota		Dinas PUTR	
		72	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten /kota		Dinas PUTR	
		73	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab /Kota		Dinas PUTR	
		74	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota		Dinas PUTR	
		75	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan		Dinas PUTR	

			TDUP yang disetujui			
		76	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas PUTR	
		77	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas PUTR	
		78	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas PUTR	
4	Perumahan Rakyat	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		Disperkimta	Tidak menangani
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		Disperkimta	
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		Disperkimta	

		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		Disperkimta	
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		Disperkimta	
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		Disperkimta	
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		Disperkimta	
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		Disperkimta	
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		Disperkimta	
		10	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Disperkimta	
		11	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Disperkimta	

		12	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Disperkimta	
		13	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Disperkimta	
		14	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Disperkimta	
		15	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		Disperkimta	
		16	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha		Disperkimta	
		17	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		Disperkimta	
		19	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		Disperkimta	
		20	Jumlah rumah di kab/kota		Disperkimta	
		21	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH		Disperkimta	
		22	Jumlah rumah tidak layak huni		Disperkimta	
		23	Jumlah rumah yang tidak dihuni		Disperkimta	
		24	Rasio rumah dan KK		Disperkimta	

		25	Jumlah rumah pembangunan baru		Disperkimta	
		26	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		Disperkimta	
		27	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		Disperkimta	
		28	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		Disperkimta	
		29	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)		Disperkimta	
		30	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		Disperkimta	
		31	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		Disperkimta	
		32	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		Disperkimta	
		33	Jumlah pengembang yang teregistrasi		Disperkimta	
		34	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		Disperkimta	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani		Satpol PP	
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		Satpol PP	Terdiri atas 558 personil

		3	Jumlah Perda dan perkara yang ditegakkan		Satpol PP	
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		Satpol PP	
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		Satpol PP	
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal		Satpol PP	<p>Tanah 1500 m2</p> <p>Alat Kantor dan rumah Tangga 731 Buah</p> <p>Gedung dan Bangunan 8 unit</p> <p>Jalan,Irigasi,dan Jaringan 2unit</p> <p>Aset Tetap Lainnya( Alat2 Drumband )106 buah</p> <p>Barang Ekstra Comtable 189 buah</p> <p>Konstruksi Dalam Pengerjaan 1</p> <p>Kendaraan Dinas Roda 4 = 8 Unit</p> <p>Kendaraan Dinas Roda 2 = 46 Unit</p>

		7	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal		BPBD	
		8	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		BPBD	
		9	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal		BPBD	
		10	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal		BPBD	
		11	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan		BPBD	
		12	Persentase warga negara yang ikut pelatihan		BPBD	
		13	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana		BPBD	
		14	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan		BPBD	
		15	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB		BPBD	
		16	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat		BPBD	

			bencana			
		17	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana		BPBD	
		18	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana		BPBD	
		19	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten /kota		Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Pelayanan 11 kali dengan 8 kali pelayanan penyelamatan darat hewan liar, 1 kali pelayanan penyelamatan bencana alam, 1 kali pelayanan penyelamatan orang pingsandan 1 kali pelayanan penyelamatan pemotongan cincin di jaritangan
		20	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		Dinas Pemadam Kebakaran	
		21	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan		Dinas Pemadam Kebakaran	
		22	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		Dinas Pemadam Kebakaran	

		23	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		Dinas Pemadam Kebakaran	
		24	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		Dinas Pemadam Kebakaran	
		25	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran		Dinas Pemadam Kebakaran	
		26	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran		Dinas Pemadam Kebakaran	Pada perencanaan awal Tahun Anggaran 2020 sudah di anggarkan untuk 2 orang mengikuti Bimtek. Karena Covid-19 bimtek dibatalkan.
6	Sosial	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		Dinas Sosial	
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM		Dinas Sosial	

		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		Dinas Sosial	
		4	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		Dinas Sosial	
		5	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau		Dinas Sosial	
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		Dinas Sosial	
		7	Jumlah rumah singgah /shelter /tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		Dinas Sosial	
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang		Dinas Sosial	
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu		Dinas Sosial	
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter		Dinas Sosial	
		11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia		Dinas Sosial	
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan		Dinas Sosial	

			paket perbekalan kesehatan			
		13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah		Dinas Sosial	
		14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		Dinas Sosial	
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, asyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah /Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		Dinas Sosial	
		16	Jumlah bimbingan social yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		Dinas Sosial	
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		Dinas Sosial	
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar		Dinas Sosial	
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan		Dinas Sosial	

			penelusuran keluarga			
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		Dinas Sosial	
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		Dinas Sosial	
		22	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		Dinas Sosial	
		23	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		Dinas Sosial	
		24	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		Dinas Sosial	
		25	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		Dinas Sosial	
		26	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		Dinas Sosial	
		27	Jumlah pekerja sosial profesional /tenaga esejahteraan sosial dan/atau relawan social yang tersedia		Dinas Sosial	
7	Tenaga Kerja	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.		Disnaker	
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja		Disnaker	

		3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota		Disnaker	
		4	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster		Disnaker	
		5	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi		Disnaker	
		6	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan		Disnaker	
		7	Persentase LPK yang terakreditasi		Disnaker	
		8	Persentase LPK yang memiliki perizinan		Disnaker	
		9	Jumlah penganggur yang dilatih		Disnaker	
		10	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan		Disnaker	
		11	Persentase penyerapan lulusan		Disnaker	
		12	Lulusan bersertifikat kompetensi		Disnaker	
		13	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan		Disnaker	
		14	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)		Disnaker	
		15	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas		Disnaker	
		16	Data tingkat produktivitas total		Disnaker	

		17	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)		Disnaker	
		18	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)		Disnaker	
		19	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		Disnaker	
		20	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah		Disnaker	
		21	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan		Disnaker	
		22	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih		Disnaker	
		23	Jumlah mogok kerja		Disnaker	
		24	Jumlah penutupan perusahaan		Disnaker	
		25	Jumlah perselisihan kepentingan		Disnaker	
		26	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		Disnaker	
		27	Jumlah perselisihan PHK Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK		Disnaker	

		28	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		Disnaker	
		29	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan		Disnaker	Karena tim ini melibatkan pejabat tinggi yang ada di kabupaten/Kota dan 9 kabupaten/Kota seBali belum ada yang membentuk tim Tripartit
		30	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial		Disnaker	
		31	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten /kota		Disnaker	
		32	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		Disnaker	
		33	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		Disnaker	
		34	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten /kota		Disnaker	
		35	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		Disnaker	
		36	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota		Disnaker	
		37	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan		Disnaker	

			oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota			
		38	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		Disnaker	
		39	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi		Disnaker	
		40	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		Disnaker	
		41	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan		Disnaker	
		42	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja		Disnaker	
		43	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya		Disnaker	
		44	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk		Disnaker	
8	Pemberdayaan Perempuan dan	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih		DPPKBPPPA	

Perlindungan Anak		PUG			
	2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota		DPPKBPPPA	
	3	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab /kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		DPPKBPPPA	
	4	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		DPPKBPPPA	Lembaga layanan P2TP2A Berupa SK Bupati Buleleng No. 476 / 155 / HK / 2020 Tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Kader Perempuan di Kabupaten Buleleng Tahun 2020
	5	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani		DPPKBPPPA	
	6	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		DPPKBPPPA	
	7	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan /fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)		DPPKBPPPA	
	8	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat		DPPKBPPPA	

			kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan			
		9	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih		DPPKBPPPA	
		10	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		DPPKBPPPA	
		11	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		DPPKBPPPA	
		12	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		DPPKBPPPA	
		13	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi		DPPKBPPPA	
		14	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani		DPPKBPPPA	
9	Ketahanan Pangan	1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan		DKPP	16 Lumbung Pangan Masyarakat
		2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya		DKPP	10 Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
		3	Tersedianya regulasi harga minimum		DKPP	

			daerah untuk pangan lokal			
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang		DKPP	Berupa kegiatan Gelar Pangan Lokal dan Pembinaan serta Pendampingan Usaha Pangan Lokal
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan		DKPP	adanya dokumen berupa Peta FSVA
			Tertanganinya kerawanan pangan		DKPP	Berupa Bantuan P2L kepada Desa Rawan Pangan dan Bantuan Ayam Buras kepada desa prioritas 1 Peta FSVA
		6	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan		DKPP	
		7	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar		DKPP	Berupa kegiatan pengambilan sampel bahan makanan yang mengandung bahan pengawet
10	Pertanahan	1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota		Disperkimta	



		2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum / Absentee dan Daftar Subyek		Disperkimta	
		3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum /Absentee		Disperkimta	
		4	Dokumen Izin membuka tanah		Disperkimta	
		5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten /Kota		Disperkimta	
11	Lingkungan Hidup	1	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)		DLH	
		2	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota		DLH	
		3	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten /kota		DLH	
		4	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kabupaten /Kota terhadap		DLH	

			usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota			
		5	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota		DLH	
		6	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH		DLH	
		7	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang Diberikan diklat		DLH	
		8	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten /kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani		DLH	
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1	Penerbitan akta perkawinan		Disdukcapil	
		2	Penerbitan akta perceraian		Disdukcapil	
		3	Penerbitan akta kematian		Disdukcapil	
		4	Penyajian data kependudukan		Disdukcapil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		DPMD	Tidak ada Desa dengan status Desa tertinggal pada

	Desa					Tahun 2020
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		DPMD	Tidak ada Desa dengan status Desa tertinggal pada Tahun 2020
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		DPMD	Tidak ada Desa dengan status Desa tertinggal pada Tahun 2020
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		DPMD	Tidak ada Desa dengan status Desa tertinggal pada Tahun 2020
		5	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		DPMD	5 Desa Bali Aga yakni Sidetapa, Cempaga, Tigawasa, Pedawa dan Banyuseri.
		6	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		DPMD	Tahun 2019 ada 5 Desa Bali Aga yakni Sidetapa, Cempaga, Tigawasa, Pedawa dan Banyuseri yang melakukan kerjasama
		7	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		DPMD	

		8	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		DPMD	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		DPPKBPPPA	Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Buleleng Tahun 2010 – 2035 berdasarkan SK Ketua Umum Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Provinsi Bali No: 800/KP/300/2020
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		DPPKBPPPA	
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		DPPKBPPPA	
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)		DPPKBPPPA	
		5	Jumlah takeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		DPPKBPPPA	

		6	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP		DPPKBPPPA	
		7	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		DPPKBPPPA	
		8	Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		DPPKBPPPA	
		9	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan		DPPKBPPPA	
		10	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah		DPPKBPPPA	
		11	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)		DPPKBPPPA	
15	Perhubungan	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C		Dinas Perhubungan	
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala		Dinas Perhubungan	
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi		Dinas Perhubungan	
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota		Dinas Perhubungan	

		5	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota		Dinas Perhubungan	
16	Kominfo	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo		Dinas Kominfo	
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo		Dinas Kominfo	
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		Dinas Kominfo	
		4	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015		Dinas Kominfo	

		5	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar		Dinas Kominfosantik	
		6	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan		Dinas Kominfosantik	
		7	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik		Dinas Kominfosantik	
		8	Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik		Dinas Kominfosantik	
		9	Persentase system elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		Dinas Kominfosantik	
		10	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah		Dinas Kominfosantik	
		11	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah		Dinas Kominfosantik	
		12	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data		Dinas	

			pemerintah		Kominfoantik	
		13	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)		Dinas Kominfoantik	
		14	Persentase data yang dapat berbagi pakai		Dinas Kominfoantik	
		15	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city		Dinas Kominfoantik	
		16	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo		Dinas Kominfoantik	
		17	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e- government		Dinas Kominfoantik	
		18	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi		Dinas Kominfoantik	
		19	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)		Dinas Kominfoantik	
		20	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi		Dinas Kominfoantik	

			(STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan			
17	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		DISDAGPERI NKOPUKM	
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		DISDAGPERI NKOPUKM	
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		DISDAGPERI NKOPUKM	
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten /kota		DISDAGPERI NKOPUKM	
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		DISDAGPERI NKOPUKM	
		6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah		DISDAGPERI NKOPUKM	

			keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		DISDAGPERI NKOPUKM	
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		DISDAGPERI NKOPUKM	Tidak perlu diisi
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		DISDAGPERI NKOPUKM	
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		DISDAGPERI NKOPUKM	
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		DISDAGPERI NKOPUKM	
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		DISDAGPERI NKOPUKM	
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk		DISDAGPERI	

			koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		NKOPUKM	
		14	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro		DISDAGPERI NKOPUKM	
		15	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)		DISDAGPERI NKOPUKM	
		16	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra		DISDAGPERI NKOPUKM	
		17	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha		DISDAGPERI NKOPUKM	
		18	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		DISDAGPERI NKOPUKM	
		19	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		DISDAGPERI NKOPUKM	
		20	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan		DISDAGPERI NKOPUKM	
18	Penanaman Modal	1	PERDA mengenai pemberian fasilitas /intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten /kota		DPMPSTSP	Dokumen berupa Naskah akademik "Ranperda Kabupaten Buleleng
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif		DPMPSTSP	Dokumen SOP masih berupa

			penanaman modal			draf
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		DPMPTSP	Belum ada laporan evaluasi
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting		DPMPTSP	zoom Meeting / webinar temu Mitra Usaha pada tanggal 10 November 2020
		5	Kegiatan pameran penanaman modal		DPMPTSP	Kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan penerimaan audiensi dari tim ahli konsulat jenderal Amerika Serikat pada tanggal 10 Pebruari 2020
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal		DPMPTSP	penerimaan audiensi dari tim ahli konsulat jenderal Amerika Serikat pada tanggal 10 Pebruari 2020
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		DPMPTSP	
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		DPMPTSP	Jumlah perizinan terbit =4.005 Jumlah Nonperizinan terbit=1.666
		9	Laporan realisasi penanaman modal		DPMPTSP	
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota		DPMPTSP	

		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN		DPMPTSP	192 perusahaan yang telah mendapat pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi abupaten/kota		DPMPTSP	
19	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan			
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan			
		3	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda			
		4	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan			
		5	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan			
		6	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah			
20	Statistik	1	Tersedianya buku profil daerah		Dinas Kominfosantik	Buku Buleleng Dalam Data

		2	Jumlah survey statistic sektoral yang dilakukan		Kominfoantik	
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		Dinas Kominfoantik	
		4	Jumlah survey statistic sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		Dinas Kominfoantik	
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		Dinas Kominfoantik	
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistic sektoral		Dinas Kominfoantik	
		7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral		Dinas Kominfoantik	
21	Persandian	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan		Dinas Kominfoantik	
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip- prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah		Dinas Kominfoantik	

		3	Persentase sistem elektronik /asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah		Dinas Kominfosantik	
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan		Dinas Kominfosantik	
22	Kebudayaan	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)		Dinas Kebudayaan	
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman		Dinas Kebudayaan	
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)		Dinas Kebudayaan	
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)		Dinas Kebudayaan	
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		Dinas Kebudayaan	
		6	Perlindungan cagar budaya kabupaten		Dinas	

			/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)		Kebudayaan	
		7	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data		Dinas Kebudayaan	
		8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)		Dinas Kebudayaan	
		9	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)		Dinas Kebudayaan	Pura Medue Karang Pura beji
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		Dinas Kebudayaan	
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum		Dinas Kebudayaan	
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.		Dinas Kebudayaan	
		13	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		Dinas Kebudayaan	
		14	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya		Dinas Kebudayaan	Terdiri atas 5 anggota
		15	Pembentukan tim ahli cagar budaya		Dinas	

			provinsi		Kebudayaan	
		16	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya		Dinas Kebudayaan	
		17	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman		Dinas Kebudayaan	
		18	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman		Dinas Kebudayaan	
		19	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman		Dinas Kebudayaan	
		20	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		Dinas Kebudayaan	
23	Perpustakaan	1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
		2	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	

		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
		6	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi /dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
		7	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
		8	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Belum ada koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng
24	Kearsipan	1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	

		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
		5	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
		6	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
		7	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
		8	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
		9	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten /Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
		10	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten /Kota yang sesuai NSPK		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	

1	Perikanan		Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)		DKPP	
			Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional		DKPP	
			Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan		DKPP	
			Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)		DKPP	<p>Peserta Kaji Terap Mina Padi 25 orang</p> <p>Peserta pelatihan Lele 50 orang</p> <p>Peserta Pelatihan Nila : 20 orang</p> <p>Pembudidaya ikan yang memperoleh akses penyuluhan dan penguatan kelembagaan : 10 kelompok ( 120 orang )</p>
			Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi		DKPP	
2	Pariwisata	1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		Dinas Pariwisata	
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas		Dinas Pariwisata	Fasilitas Pariwisata Pada tahun 2020 yang dibangun sejumlah 2, yaitu Gedung

			pariwisata			Tourist Information Centre ( TIC ) dan Arena Megangsing dan Penonton
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata persub jenis usaha di kabupaten/kota		Dinas Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah Jasa perjalanan wisata 4 Biro perjalanan</li> <li>▪ Penyediaan akomodasi 30 Hotel Bintang, 126 Hotel non bintang, 250 Pondok wisata, 319 Villa</li> <li>▪ Jasa makanan dan minuman 248 restoran, 241 rumah makan, 38 Bar, 21 Caf�</li> <li>▪ Spa, 23 spa pribadi dan 57 spa di hotel</li> </ul>
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		Dinas Pariwisata	
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		Dinas Pariwisata	Pemuteran By Festival secara virtual
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota		Dinas Pariwisata	
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri		Dinas Pariwisata	
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi		Dinas Pariwisata	

		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan		Dinas Pariwisata	
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		Dinas Pariwisata	
3	Pertanian	1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan		Dinas Pertanian	
		2	Prasaran pertanian yang digunakan			
		3	Penerbitan izin usaha pertanian		Dinas Pertanian	Tidak ada - karna Dinas pertanian tidak menerbitkan usulan ijin usaha pertanian. Dinas pertanian hanya memfasilitasi verifikasi usulan ijin usaha pertanian kab/kota
		4	Persentase prasarana yang digunakan		Dinas Pertanian	
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota		Dinas Pertanian	Tidak ada - karna Dinas pertanian tidak menerbitkan usulan ijin usaha pertanian. Dinas pertanian hanya memfasilitasi verifikasi usulan ijin usaha pertanian kab/kota

		6	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana		Dinas Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase penurunan kejadian kasus penyakit hewan menular : Rabies pada anjing : 10 desa/10 desa</li> <li>• Persentase penurunan kejadian kasus penyakit hewan menular : ASF pada babi ; 7 kecamatan/ 7 kecamatan</li> </ul>
4	Kehutanan	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura			
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga			
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura			
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA			
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota			Tidak melaksanakan
6	Perdagangan	1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan		DISDAGPERI NKOPUKM	

			b. Toko swalayan			
		2	Persentase penerbitan TDG		DISDAGPERI NKOPUKM	
		3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG		DISDAGPERI NKOPUKM	
		4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri		DISDAGPERI NKOPUKM	
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota		DISDAGPERI NKOPUKM	
		6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu		DISDAGPERI NKOPUKM	
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		DISDAGPERI NKOPUKM	
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu		DISDAGPERI NKOPUKM	

		9	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan		DISDAGPERI NKOPUKM	
		10	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan		DISDAGPERI NKOPUKM	
		11	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku		DISDAGPERI NKOPUKM	
7	Perindustrian	1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten /kota		DISDAGPERI NKOPUKM	
		2	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA		DISDAGPERI NKOPUKM	
		3	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industry (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan		DISDAGPERI NKOPUKM	
		4	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan		DISDAGPERI NKOPUKM	
		5	Persentase data perusahaan industry kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total		DISDAGPERI NKOPUKM	

			populasi perusahaan industry kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten /Kota			
8	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya		Disnaker	
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya		Disnaker	
		3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina		Disnaker	

**INDIKATOR KINERJA KUNCI  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

**B. Indikator Kinerja Kunci Hasil**

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		Disdikpora



		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			Disdikpora	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama			Disdikpora	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			Disdikpora	Data penduduk 7-18 th yang putus sekolah/belum menempuh pendidikan dasar dan menengah
2.	Kesehatan	1	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi			Dinas Kesehatan	
		2	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			Dinas Kesehatan	
		3	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan			Dinas Kesehatan	
		4	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan			Dinas	

			kesehatan bayi baru lahir			Kesehatan	
		5	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			Dinas Kesehatan	
		6	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai			Dinas Kesehatan	
		7	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			Dinas Kesehatan	
		8	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			Dinas Kesehatan	
		9	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			Dinas Kesehatan	
		10	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			Dinas Kesehatan	
		11	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			Dinas Kesehatan	

		12	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar			Dinas Kesehatan	
		13	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten			Dinas PUTR	
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten			Dinas PUTR	
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten /kota yang dilayani oleh jaringan irigasi			Dinas PUTR	
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan			Dinas PUTR	

			akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota				
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			Dinas PUTR	
		6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota			Dinas PUTR	
		7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota			Dinas PUTR	
		8	Rasio tenaga operator /teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi			Dinas PUTR	
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi			Dinas PUTR	
4	Perumahan Rakyat	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota			Disperkimta	

		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten			Disperkimta	
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani			Disperkimta	
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)			Disperkimta	
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			Disperkimta	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			Satpol PP	
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			Satpol PP	
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			BPBD	
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan			BPBD	

			pengecehan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			BPBD
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			Dinas Damkar
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran			Dinas Damkar
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan)			Dinas Sosial
			pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM			Dinas Sosial
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten			Dinas Sosial

7	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja			Dinas Tenaga Kerja	
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi			Dinas Tenaga Kerja	
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja			Dinas Tenaga Kerja	
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)			Dinas Tenaga Kerja	
		5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui			Dinas Tenaga Kerja	
			Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten				
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD			DPPKBPPPA	

		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten /Kota			DPPKBPPPA	
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)			DPPKBPPPA	
9	Ketahanan Pangan	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)			DKPP	
10	Pertanahan	1	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten			Disperkimta	
		2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan			Disperkimta	
		3	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum			Disperkimta	

		4	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal			Disperkimta	
		5	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee			Disperkimta	
		6	Tersedianya tanah untuk masyarakat			Disperkimta	
		7	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi			Disperkimta	
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten			Dinas LH	
		2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten			Dinas LH	
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten			Dinas LH	

12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1	Perekaman KTP Elektronik			Disdukcapil	
		2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA			Disdukcapil	
		3	Kepemilikan akta kelahiran			Disdukcapil	
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama			Disdukcapil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal			Dinas PMD	
		2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri			Dinas PMD	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)			DPPKBPPPA	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)			DPPKBPPPA	
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi			DPPKBPPPA	

			(unmet need)			
15	Perhubungan	1	Rasio konektivitas Kabupaten		Dinas Perhubungan	
		2	Rasio konektivitas Provinsi			
		3	V/C Ratio di Jalan Kabupaten		Dinas Perhubungan	
16	Kominfo	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		Diskominfo, Statistik dan Persandian	
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		Diskominfo, Statistik dan Persandian	
		3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Diskominfo, Statistik dan Persandian	

17	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas			DISDAGPERIN KOPUKM	
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha			DISDAGPERIN KOPUKM	
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten			DPMPTSP	
19	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri			DISDIKPORA	
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan			DISDIKPORA	
		3	Peningkatan Prestasi Olahraga			DISDIKPORA	
20	Statistik	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan			Diskominfo, Statistik dan Persandian	

			daerah				
		2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			Diskominfo, Statistik dan Persandian	
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah			Diskominfo, Statistik dan Persandian	belum ada SDM yang mampu melaksanakan self assessment/security assesment, BSSN Tahun 2020 tidak jadi melaksanakan assesment dikarenakan pandemic
22	Kebudayaan	1	Terlestarikannya Cagar Budaya			DINAS KEBUDAYAAN	
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat			Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat untuk di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah belum dapat dilaksanakan. Kajian kegemaran membaca masyarakat sudah diusulkan pelaksanaannya ke Badan Penelitian, Pengembangan

							dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng.
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat untuk di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah belum dapat dilaksanakan. Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sudah diusulkan pelaksanaannya ke Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan			Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	

			rakyat				
1	Perikanan	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)			DKPP	
2	Pariwisata	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan			Dinas Pariwisata	
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten			Dinas Pariwisata	
		91	Tingkat Hunian Akomodasi			Dinas Pariwisata	
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku			Dinas Pariwisata	
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD			Dinas Pariwisata	

3	Pertanian	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun			Dinas Pertanian	
		95	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular			Dinas Pertanian	
4	Energi dan Sumber Daya Mineral	96	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota			-	Kabupaten Buleleng tidak memiliki potensi sumber daya alam panas bumi
5	Perdagangan	97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)			DISDAGPERIN KOPUKM	
		98	Persentase kinerja realisasi pupuk			DISDAGPERIN KOPUKM	
		99	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang			DISDAGPERIN KOPUKM	

			berlaku			
6	Perindustrian	100	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota			DISDAGPERIN KOPUKM
		101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK			DISDAGPERIN KOPUKM
		102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			DISDAGPERIN KOPUKM
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			DISDAGPERIN KOPUKM
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah			DISDAGPERIN KOPUKM

			Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota			
		105	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini			DISDAGPERIN KOPUKM

### C. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
PERENCANAAN DAN KEUANGAN				



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara

1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan			BPKPD	
2	Rasio PAD			BPKPD	
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			Inspektorat	
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)			Inspektorat	belum mendapatkan <i>quality assurance</i> , penjaminan kualitas dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)			BPKPD	
6	Opini Laporan Keuangan			BPKPD	Opini terakhir untuk Tahun 2019, Opini untuk Tahun 2020 belum ada.
PENGADAAN					
7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama			BPBJ	
8	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif			BPBJ	
9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan			BPBJ	
10	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha			BPBJ	



	Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah				
KEPEGAWAIAN					
10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			BKPSDM	
11	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			BKPSDM	
12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			BKPSDM	
MANAGEMEN KEUANGAN					
13	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD			BPKPD	
14	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD			BPKPD	
15	Assets Management			BPKPD	
				BPKPD	
				BPKPD	
				BPKPD	
16	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya			BPKPD	

TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK					
17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan			BPKPD	
18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah			BPKPD	

